

BENTUK PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL
(Identifikasi Bentuk Penyelesaian Konflik antara Public Relations PT DONGGI
SENORO LIQUEFIED NATURAL GAS Kabupaten Luwuk Banggai dengan Masyarakat)

Oleh:

Siska Mahmud¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tompotika Luwuk Banggai
e-mail : siska_mahmud14@yahoo.com
siska.mahmud@gmail.com

ABSTRAK

Konflik Sosial adalah suatu peristiwa sosial yang mana orang perorangan atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian konflik sosial antara *Public Relations* PT Donggi Senoro *Liquefied Natural Gas* dengan masyarakat sekitar perusahaan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan di kabupaten Banggai Propinsi Sulawesi Tengah. Data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan informan yang mengetahui dan terkait dengan masalah serta penyelesaian konflik sosial yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial yang dilakukan adalah dengan cara mediasi yang mengikut sertakan pemerintah setempat dan masyarakat melalui bentuk kebijakan manajemen *Public Relations* PT DSLNG Luwuk Banggai dengan melakukan langkah *Community Relations* melalui kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan melalui rumah pendampingan kepada masyarakat petani dan nelayan dalam bentuk pendidikan bidang sosial, dan pertanian.

Kata Kunci : *Public Relations; Konflik Sosial*

ABSTRACT

Social Conflict is a social event in which an individual or group tries to fulfill its objectives by opposing an opposing party accompanied by threats or violence. This study aims to determine the form of social conflict resolution between the Public Relations of PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas and the community around the company. The method used in this research is descriptive qualitative conducted in Banggai Regency, Central Sulawesi Province. Data obtained from the results of observations, documentation and interviews with informants who know and are associated with problems and resolution of social conflicts that occur. The results showed that the form of social conflict resolution carried out was by means of mediation which included the local government and the community through the form of Public Relations management policy of PT DSLNG Luwuk Banggai by carrying out Community Relations steps through CSR activities to the community around the company through a house of assistance to the farming community and fishermen in the form of social education, and agriculture.

Keywords: *Public Relations; Social Conflict*

PENDAHULUAN

Public Relations memainkan kegiatan krusial dalam membangun, mengembangkan, dan memelihara hubungan dan komunikasi antara perusahaan dengan publik. Disini *Public Relations* berfungsi sebagai *laison, interpreter, dan mediator*, yang diharapkan *Public Relations*

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNTIKA Luwuk

perusahaan tidak bisa mengabaikan fakta dalam upaya membangun hubungan dengan lingkungan perusahaan yang membutuhkan peran dan fungsi *Public Relations*. Hal ini dapat berdampak pada cara dan kegiatan perusahaan berhubungan dengan tiap publiknya untuk mencari solusi dari masalah komunikasi yang terjadi seperti masalah konflik sosial yang terjadi di Proyek kilang Gas Alam pada PT Donggi Senoro *Liquefied Natural Gas* (DSLNG) Kabupaten Luwuk Banggai. Upaya untuk melibatkan semua publik dalam menyelesaikan konflik sosial bisa jadi memakan waktu yang lama. Meskipun demikian, untuk jangka panjang cara penyelesaian dengan melibatkan pihak manajemen lebih baik, karena mereka akan memiliki komitmen dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan manajemen *Public Relations* ini sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Agar terwujud hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya dalam hal mengatasi konfliknya. Sama halnya dengan penyelesaian konflik untuk penyelesaian masalah sosial seperti pada kasus yang terjadi pada perusahaan Donggi Senoro *Liquefied Natural Gas* Kabupaten Luwuk Banggai ini dimana konflik ini terjadi pada awal dibangunnya perusahaan pada tahun 2011 sampai pada tahun 2014 mengenai sengketa tanah, dan pembayaran tanah masyarakat yang tidak sesuai dengan prosedur perjanjian yang disepakati bersama antara perusahaan bersama masyarakat sekitar perusahaan yang menyebabkan konflik sosial terjadi sepanjang tahun 2011 saat awal perusahaan ini masuk diwilayah kabupaten banggai. berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti bentuk *Bentuk Penyelesaian Konflik Sosial Public Relations (Pr) Pt Donggi Senoro Liquefied Natural Gas Kabupaten Luwuk Banggai Pasca Konflik Pada Masyarakat Sekitar*, dengan tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian konflik pada masyarakat pasca konflik sosial yang terjadi yang dilakukan oleh pihak manajemen public relations (PR) PT.Donggi Senoro *Liquefied Natural Gas* Kabupaten Luwuk Banggai.

TINJAUAN PUSTAKA

• Konsep *Public Relations*

Secara umum, *Public Relations* (PR) sebagai bidang profesi hubungan masyarakat yang merupakan salah satu aspek manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial (perusahaan) maupun organisasi yang non komersial. Mulai dari yayasan, perguruan tinggi, dinas militer, sampai dengan lembaga-lembaga pemerintah, bahkan pesantren. Kehadirannya dibutuhkan karena *Public Relations* merupakan elemen yang menentukan kelangsungan suatu organisasi secara positif.

Dalam *British Institute Public Relations* dalam Anggoro M. Lingkar (2008), didefinisikan sebagai keseluruhan upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik (*goodwill*) dan saling pengertian antara satu organisasi dengan segenap khalayaknya. Selanjutnya menurut Jelaking dalam Ruslan Rosady (2006), mengatakan bahwa *public relations* merupakan suatu kegiatan yang berperan *laison, interpreter*, dan *mediator* yang diperlukan oleh setiap organisasi atau perusahaan.

Di dalam perencanaan komunikasi *Publik Relation*, krisis adalah suatu masalah (konflik) yang bisa terjadi pada sebuah organisasi baik yang bersifat komersil maupun non komersil (Sukanto Soejono, 2006). Hal ini berdampak pada cara *publik relations* berhubungan dengan tiap publiknya untuk mencari solusi dari masalah komunikasi yang terjadi seperti masalah konflik sosial. Greener dalam Toni (2002), mengemukakan bahwa *Public Relations* tidak saja arah arus informasi, ia memiliki dua fungsi peran juga dapat sebagai contoh membantu membentuk organisasi dengan informasi manajemen yang diharapkan, pendapat-pendapat dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, serta memungkinkan nasehat kembali tentang suatu tindakan yang sejalan. Organisasi membentuk melindungi dan memperkenalkannya.

• Konflik Sosial

Menurut Karl Marx bahwa terjadinya suatu konflik sosial diakibatkan karena masyarakat disatukan dengan paksaan maksudnya keteraturan yang terjadi di masyarakat disatukan dengan adanya paksaan (*Koersif*) yang mana masalah konflik sosial adalah sesuatu yang perlu terjadi karena merupakan sebab terjadinya suatu perubahan sosial dalam

masyarakat. Dimana Teori perubahan sosial juga memandang bahwa masalah yang terjadi didalam masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat, sama halnya dengan adanya suatu perusahaan yang mana kehadiran perusahaan membuat perubahan-perubahan sosial akan terjadi dalam masyarakat komunitas lingkungan dan berakibat terjadinya proses penyesuaian nilai-nilai sosial yang membawa perubahan serta gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, seperti terjadinya pergeseran nilai, norma, pranata sosial pada semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia.

- **Bentuk Penyelesaian Konflik Sosial**

Menurut Cutlip Center dan Broom (1985:2000), bahwa bentuk penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat merupakan kebijakan dari kegiatan manajemen Public Relations (PR) yang merupakan proses kerja public relations dalam mewujudkan hubungan yang menciptakan opini yang *favorable* (harmonis). Dalam proses kerja ini publik relations dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan setiap keputusan yang telah disepakati oleh perusahaan. Dimana proses penyelesaian konflik sosial melalui kebijakan Public Relations (PR) adalah mempengaruhi terjadinya perubahan dalam lingkungan perusahaannya, dan terlebih lagi pada organisasi perusahaan yang memiliki kekuatan mempengaruhi kekuatan lingkungan untuk merubah diri masyarakatnya. Ada beberapa isu penting dalam pembuatan suatu kebijakan dalam penyelesaian konflik sosial ini dan yang menjadikan berfungsinya proses kerja manajemen Public Relations dan yang harus dipahami oleh manajemen Public Relations PT DSLNG Kabupaten Luwu Banggai dalam menyelesaikan masalah konflik sosial pada masyarakatnya.

Menurut Bertrand R. Canfield (1964: 6) dalam menyelesaikan konflik, *Pertama*, Public Relations seharusnya menyadari dan menekankan dalam manajemen PR perusahaan akan keberadaannya ditengah-tengah lingkungan masyarakat sekitar perusahaannya seperti: konsumen, pesaing, supplier, distributor, dan karyawan, yang dapat membawa dampak hakekat praktek kegiatan perusahaan yang positif. Dimana perusahaan harus dapat memonitor dan merasakan berbagai perubahan yang terjadi dilingkungan sekitar perusahaan untuk kemudian mengembangkan perencanaan strategis yang tepat. *Kedua*, pendekatan sistem mendefinisikan perusahaan sebagai sub sistem yang saling berhubungan. Perusahaan sebagai suatu sistem, maka unit-unit yang ada didalamnya merupakan sub-sub sistem dengan lingkungan, maka lingkungan merupakan suprasistem dari perusahaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebenarnya perusahaan merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, didalamnya bisa meliputi pemerintah, organisasi lain dan sebagainya. Oleh karena itu Public Relations (PR) perlu menemukan cara untuk mengelola hubungan antar subsistem yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar perusahaannya. Seperti menemukan cara bagaimana menyelesaikan masalah pengangguran dari keluarga eks pemilik lahan, dan sebagainya. *Ketiga*, adanya upaya untuk menciptakan keselarasan antara sistem-sistem yang berbeda dan mengidentifikasi serta mengeliminasi disfungsi-disfungsi potensial seperti masalah konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar perusahaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu secara terperinci dengan mengamati langsung dari lapangan penelitian mengenai bentuk penyelesaian konflik agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena penelitian. Menurut Bungin (2012:67), penelitian kualitatif terdiri dari 3 model yaitu, *deskriptif, dan verifikatif, dan grounded theory*. Lebih lanjut denim (2004:41) yang menjelaskan bahwa ciri penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan kejadian dan praktek yang sedang berlangsung maka peneliti mendapatkan gambaran mengenai bentuk penyelesaian konflik sosial PR PT DSLNG Luwu Banggai pasca konflik yang terjadi pada masyarakat. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer yang berupa data

yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pihak manajemen Public Relations (PR) PT DSLNG Kabupaten Luwuk Banggai, data yang diperoleh dari hasil observasi lapangan, serta hasil telaah dokumen yang berhubungan dengan proses kegiatan yang telah dilakukan kemudian data sekunder berupa data yang diperoleh dari surat kabar, dan informasi dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kabupaten Luwuk Banggai. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dengan model Miler dan Haberman (1984), yang mengemukakan bahwa dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh.

PEMBAHASAN

Bentuk Penyelesaian Konflik Antara *Public Relations* PT DSLNG Dengan Masyarakat Sekitar Perusahaan

Masalah konflik sosial pada prinsipnya bisa dan dapat terjadi pada beragam organisasi atau perusahaan apapun bentuknya karena masyarakat dipaksakan untuk bersaing meneruskan kehidupannya terlebih bagi masyarakat yang berada dekat dengan lingkungan perusahaan beroperasi. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial ini diperlukan suatu kebijakan strategi antisipasi awal (*Pre-emptive strategy*) dalam penyelesaian konflik sosial yang ada pada masyarakat dan perusahaan. Alasan yang paling mendasar mengapa antisipasi awal konflik sosial perlu dilakukan dan diwaspadai adalah bahwa dengan adanya perusahaan dapat membawa pada perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat baik secara sosial, ekonomi, politik dan budaya. Yang mana masalah konflik sosial ini bisa menjadi isu krisis. Dimana krisis yang terjadi dalam sebuah perusahaan sesungguhnya adalah isu yang tadinya dianggap tidak penting oleh pihak manajemen tetapi dapat berakibat fatal pada citra perusahaan.

Hal ini juga sejalan dengan teori konflik sosial dari Karl Marx yang menyatakan bahwa terjadinya suatu konflik sosial diakibatkan karena masyarakat disatukan dengan paksaan maksudnya keteraturan yang terjadi di masyarakat disatukan dengan adanya paksaan (*Koersif*) yang mana masalah konflik sosial adalah sesuatu yang perlu terjadi karena merupakan sebab terjadinya suatu perubahan sosial dalam masyarakat. Dimana Teori perubahan sosial juga memandang bahwa masalah yang terjadi didalam masyarakat akan berdampak pada perubahan sosial dalam masyarakat, sama halnya dengan adanya suatu perusahaan yang mana kehadiran perusahaan membuat perubahan-perubahan sosial akan terjadi dalam masyarakat komunitas lingkungan dan berakibat terjadinya proses penyesuaian nilai-nilai sosial yang membawa perubahan serta gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, seperti terjadinya pergeseran nilai, norma, pranata sosial pada semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antar manusia.

Pergeseran nilai ini membuat tingkat kesenjangan yang tinggi dalam perekonomian masyarakat sehingga lapangan pekerjaan dijadikan bentuk persaingan antar masyarakat termasuk di dalamnya faktor kemiskinan, pengangguran pemuda desa, maupun kecemburuan sosial, dan timbulnya konflik antar masyarakat serta masalah sosial lainnya. Karena lahan yang dulunya menjadi tempat untuk kelangsungan hidup mereka kini dijadikan tempat pengoperasian perusahaan. Sehingga antara komunitas masyarakat yang sebelumnya menjalin hubungan yang harmonis kini berubah menjadi masyarakat kurang harmonis.

Dalam konteks ini bentuk penyelesaian konflik yang terjadi antara PT DSLNG sesungguhnya sangat bergantung dengan kebijakan pihak manajemen *Public Relations* perusahaan yang ada pada lingkungan kehidupan masyarakat. Dimana Kebijakan *Public Relations* merupakan cara pihak manajemen perusahaan PT DSLNG Luwuk Banggai untuk dapat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi terutama pada pihak yang kontra pada perusahaan seiring dengan munculnya isu atau masalah konflik sosial yang bisa menghambat aktivitas organisasi dan jalannya pengoperasian perusahaan. Untuk itu *Public Relations* PT DSLNG perlu membangun dan membentuk komunikasi antara perusahaan dan masyarakat, meskipun dalam pelaksanaan *Public Relations* (PR) PT DSLNG belum melakukan kegiatannya secara maksimal dalam penanganan konflik sosialnya, dalam hal menyelesaikan konflik sosial yang terjadi pada masyarakat sekitar perusahaan.

Beberapa cara dan upaya dilakukan oleh Manajemen Public Relations PT DSLNG Kabupaten Luwuk Banggai dalam menyelesaikan konflik sosial pada masyarakat sekitar perusahaan pasca terjadinya konflik sosial, antara lain melalui proses mediasi dan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan melibatkan pemerintah maupun para eks-pemilik lahan, juga melakukan kebijakan melalui kegiatan program CSR. Selain itu strategi yang juga dilakukan HRD PT DSLNG dalam menyelesaikan masalah konflik sosial, adalah membentuk komunitas-komunitas dalam bidang sosial seperti, perhimpunan perempuan dan pemuda dalam hal untuk membantu para kaum perempuan desa bersama pemuda desa untuk meningkatkan keterampilan diri masyarakat dengan membentuk kumpulan kerajinan tangan *entrepreneurship* (wirausaha).

Hal ini dapat pula dilihat melalui bidang pertanian dimana pihak manajemen relations memberikan pengajaran mengenai pola pembibitan dalam hal memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang berofesi sebagai petani, yang bisa dirasakan manfaatnya terutama masyarakat pemilik lahan sebagai pengganti lahan mereka yang telah diambil oleh perusahaan yang mana hal ini juga dapat mereka lakukan pada kediaman rumah mereka, maupun pada rumah pendampingan yang dibuat oleh manajemen PR melalui *Community Sosial Responsibility* (CSR) yang ada di sekitar perusahaan, hal yang sama pula dilakukan pada masyarakat nelayan bagaimana mendapatkan pendapatan melalui pekerjaan nelayan melalui cara penanaman bibit batu karang yang mana karang-karang ini dapat menjadi tempat hidup habitat laut, dan pengolahan rumput laut sebagai pengganti hasil tangkapan ikan yang dapat dijual sebagai hasil tambahan para nelayan, jika musim panen ikan belum tiba. Seperti kita ketahui bersama bahwa dengan adanya pembangunan sutet perusahaan menjadi pengurangan ruang gerak bagi para nelayan sehingga mengurangi tingkat pendapatan masyarakat nelayan sekitar perusahaan, namun dengan adanya kebijakan manajemen PR perusahaan masalah pemicu konflik sosial dalam masyarakat dapat diatasi sehingga manajemen Public Relations (PR) perusahaan diharapkan berperan aktif dalam masyarakat guna pelaksanaan program kegiatan CSR yang ditujukan pada masyarakat sekitar perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat yang sejahtera sesungguhnya sangat bergantung dengan kebijakan pihak manajemen perusahaan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sementara kebijakan pihak manajemen perusahaan PT DSLNG Luwuk Banggai terutama pada manajemen public relations dihadapkan pada kenyataan lingkungan yang terus berubah. Pada saat bersamaan, publik atau stakeholder organisasi menuntut kinerja perusahaan yang lebih terbuka dan peduli terhadap komunitas dan lingkungan yang ada disekitar perusahaannya. Adanya pengharapan dari publik seiring dengan keberadaan perusahaan kiranya perlu mendapatkan perhatian pihak manajemen public relations perusahaan, terlebih publik merasa apa yang disampaikan atau diharapkan dari perusahaan ternyata tidak terpenuhi maka ini menjadi awal dari munculnya isu atau masalah konflik sosial yang bisa menghambat aktivitas perusahaan. Seperti konflik masalah tenaga kerja dan sengketa lahan yang sering menjadi isu penyebab terjadinya konflik antar masyarakat pada pihak perusahaan maupun antar warga pendatang.

Masalah konflik sosial pada prinsipnya bisa dan dapat terjadi pada beragam organisasi atau perusahaan apapun bentuknya karena masyarakat dipaksakan untuk bersaing meneruskan kehidupannya terlebih bagi masyarakat yang berada dekat dengan lingkungan perusahaan beroperasi. Dalam konteks ini manajemen public relations perusahaan dituntut untuk mampu bekerja sama dengan sistem dari publiknya yang ada dalam lingkungannya sebagai suatu upaya untuk menciptakan keharmonisan, keselarasan, sehingga akan menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai objektive tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tersebut meliputi tiga aktivitas program berjangka yang merupakan program khusus yang dibuat oleh PT DSLNG dalam Community Relations yang melibatkan masyarakat dalam jangka waktu sedang hingga panjang. *Pertama*, konsep pengembangan kapasitas bagi guru yang bekerja sama dengan tim sar CSR pertamina, PT DSLNG juga menyeleksi guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Banggai untuk bergabung di program sertifikasi guru yang diselenggarakan oleh kementerian pendidikan yang terdiri dari kelas bahasa inggris. *Kedua*, PT DSLNG berinisiatif menyediakan kursus bahasa inggris. Dimana siswa-siswi yang terpilih dapat mengikuti kursus ini seminggu

dua kali. *Ketiga*, konsep pengembangan kapasitas dan program pemberdayaan di maksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan, PT DSLNG bekerja sama dengan Balai Latihan kerja untuk melaksanakan pelatihan kejuruan ini. Aktivitas tersebut termasuk kursus menjahit, pengelasan, pengelolaan perkebunan coklat dan pertanian organis (sayuran dan tanaman hias) dan produktivitas perikanan. Dimana tujuan dari proses ini adalah untuk memiliki tujuan perusahaan yang dapat diterima dan didukung baik oleh publiknya sehingga kegiatan public relations dalam menyelesaikan masalah konflik sosial dapat teratasi. Kebijakan yang pro aktif ini penting bagi pembuatan keputusan organisasi. Inilah alasan mengapa public relations menjadi bagian yang krusial dalam menangani masalah konflik sosialnya. Dalam konteks ini public relations PT DSLNG memainkan peran yang krusial dalam membangun, mengembangkan dan memelihara hubungan dan komunikasi antara perusahaan dengan beragam publiknya.

Public relations memiliki wewenang untuk mengelola aktivitas dalam rangka mengembangkan hubungan dengan beragam publiknya. Salah satu faktor perlunya kegiatan dan peran public relations dalam sebuah perusahaan adalah seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas kegiatan perusahaan, dan semakin kritis dan spesifiknya publik, yang berdampak pada kebutuhan membangun hubungan dan komunikasi yang beragam. Aktivitas kegiatan perusahaan yang semakin luas dan membawa konsekuensi yang lebih besar berdampak pada perlunya pihak manajemen perusahaan memberi penjelasan atas beragam aktivitas yang dijalankan kepada publik dalam hal ini publik masyarakatnya. Kegiatan public relations PT DSLNG seharusnya menerapkan sistem pro aktif yang perannya dalam penyelesaian konflik sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dapat merubah lingkungan dan organisasi masyarakat dan memberi kebijakannya kepada masyarakat yang terkena sengketa lahan akibat dari pengambilan lahan untuk pengoperasian perusahaan pada masyarakat membuat terjadinya pergeseran nilai sosial dalam budaya.

PENUTUP

Cara yang dilakukan oleh PT DSLNG untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi dengan masyarakat di sekitar perusahaan adalah melalui proses mediasi dan konsiliasi yang melibatkan pemerintah, dan masyarakat yang terdiri dari masyarakat petani, dan nelayan melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan pada rumah pedampingan yang berada di Kecamatan Batui Kabupaten Luwuk Banggai melalui kebijakan manajemen Public Relations (PR) yang didasarkan pada hasil program kegiatan CSR. Dimana kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat yang bersengketa dengan perusahaan guna memberdayakan mereka dan mengurangi benturan persaingan dalam hal perekrutan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf M, 2015, *Manajemen Komunikasi Korporasi*, Aswaja Pressindo, Sleman, Yogyakarta
- Arni, Muhammad, 2002, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Abdul Rachman, Oemi. 2000, *Dasar-Dasar Publik Relations*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Arikunto, Sukarsini 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Anggoro, M.Lingkar, 2008, *Teori Dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya*, Jakarta Bumi Aksara
- Bungin, B. 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group
- _____, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo
- Greener, Toni, 2002, *Publik Relations Dan Pembentukan Citranya*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Bumi Aksara
- Nova, Firsan, 2009, *Crisis Public Relations Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan*, Jakarta, Kompas Gramedia
- Rachmadi. 2003, *Publik Relations Dalam Praktek*, Jakarta, Bumi Aksara
- _____. 1998, *Manajemen Konflik*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ruslan, Rosady. 2006, *Manajemen Humas Dan Manajemen Komunikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia
Sokanto, Soejono 2007, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta Kompas Gramedia
Wirawan. 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Salemba Humanika